

Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi

Sinta Anggraini¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram, Indonesia

Hermanto²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram, Indonesia

Siti Aisyah Hidayati³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram, Indonesia

Surel : sintaanggraini251@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan dimoderasi oleh sistem pengendalian intern. Populasi penelitian ini adalah 32 OPD, 40 anggota DPRD, dan 20 LSM pemerintah daerah Kota Mataram. Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan dan komitmen organisasi, akan tetapi memperlemah pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini berimpikasi bagi pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan langkah-langkah dan kebijakan lebih lanjut terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan; Aksesibilitas Laporan Keuangan; Komitmen Organisasi; Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah; Sistem Pengendalian Intern.

Determinants of Regional Financial Management Accountability with Internal Control System as Moderating Variable

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of financial statement presentation, financial statement accessibility, and commitment to financial management accountability moderated by internal control system. The population of this research is 32 OPD, 40 DPRD members, and 20 Mataram City government NGOs. The results show that the internal control system strengthens the presentation of financial statements and commitments, but weakens the accessibility to financial accountability. The implication of this research can provide input for local government to make further policies related to regional financial management.

Keywords: Presentation of Financial Statements; Accessibility of Financial Statements; Organizational Commitment; Accountability of Regional Financial Management; Internal Control System.



e-ISSN 2302-8556

Vol. 31 No. 8
Denpasar, Agustus 2021
Hal. 1881-1895

DOI:
[10.24843/EJA.2021.v31.i08.p01](https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p01)

PENGUTIPAN:
Anggraini, S., Hermanto, H., & Hidayati, S.A. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 1881-1895

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
9 Juli 2021
Artikel Diterima:
25 Agustus 2021

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik. Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah Kota Mataram mengalami defisit APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp103,9 miliar sebagai dampak pandemi covid-19. Pendapatan daerah semula Rp1,5 triliun berkurang sebesar Rp157,5 miliar menjadi Rp1,3 triliun. Kemudian belanja daerah semula Rp1,5 triliun berkurang sebesar Rp74,3 miliar sehingga menjadi Rp1,4 triliun. Sementara defisit semula Rp20,8 miliar bertambah sebesar Rp83,1 miliar sehingga menjadi Rp103,9 miliar. Begitu juga dengan pembiayaan (Nirkomala, 2020). Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2019 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Mataram, BPK menemukan temuan terhadap masing-masing OPD yakni, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Kecamatan Mataram, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Dinas PUPR. Temuan tersebut terkait dengan kerugian daerah sebesar Rp 498 juta akibat kekurangan volume pekerjaan dienam OPD tersebut.

Adapun faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan oleh pemerintah harus memenuhi unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Safutra *et al.* (2019) dan Nurritziana *et al.* (2017) memberikan bukti bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Hulu *et al.* (2020) dan Aprilia (2019) menunjukkan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan untuk memberikan aksesibilitas dan tingkat pengungkapan laporan keuangan kepada *stakeholder* adalah kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas keuangan daerah (Somad, 2016). Beberapa penelitian yang terkait dengan aksesibilitas laporan keuangan yaitu, Natawibawa *et al.* (2019) dan Nurritziana *et al.* (2017) membuktikan adanya pengaruh positif antara aksesibilitas keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Triyono *et al.* (2019) dan Hasibuan

(2018) yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian Savitri *et al.* (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, artinya semakin tinggi komitmen yang dibuat oleh aparatur pemerintah maka semakin baik dan semakin tinggi pengaruhnya terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan komitmen etis aparatur pemerintah dalam mengelola anggaran, maka penggunaan dana dapat sesuai dengan perencanaan dan peruntukannya sehingga tujuan dapat tercapai (Hardiningsih *et al.* 2020). Namun hal tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2018) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas.

Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan adanya *control* atau pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penelitian Mulyanto *et al.* (2020) membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Yolanda (2018) yang menghasilkan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan dimoderasi oleh sistem pengendalian internal pemerintah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Nurrizkiana *et al.* (2017) dan Mulyanto *et al.* (2020). Penelitian tentang komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baru sedikit yang meneliti dan belum ada yang spesifik langsung meneliti variabel komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan dimoderasi oleh variabel sistem pengendalian intern. Selain itu, lokasi penelitian yang dipilih berbeda yaitu pemerintah daerah Kota Mataram. Sehingga ini merupakan perbedaan dari penelitian ini dengan riset sebelumnya. Penelitian ini termotivasi dari adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu serta fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah Kota Mataram terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan komitmen organisasi dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern.

Teori keagenan menyatakan bahwa agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda (Eisenhardt, 1989). Prinsipal tentu menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen dan agen berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat (prinsipal) melalui laporan keuangan yang berkualitas (Puspita & Martini, 2010). Penyajian informasi yang lengkap dalam laporan keuangan daerah menunjang terciptanya transparansi dan akan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, karena penyajian informasi yang utuh dan transparan ini akan menggambarkan kinerja sesungguhnya dari suatu entitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari entitas kepada publik. Penelitian Mudhofar & Tahar (2016) menyimpulkan,

semakin baik pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan, maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Nurritziana *et al.* (2017), Jatmiko *et al.* (2019), Kurniawan & Rahayu (2019), Natawibawa *et al.* (2019), Safutra *et al.* (2019), dan Fuad & Winarsih (2021) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Teori agensi menyatakan kemudahan dalam mengakses laporan keuangan pemerintah sebagai agen sangat penting bagi prinsipal sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kontrak atau program-program pemerintah yang dibahas dalam musrenbang pemerintah ataupun janji-janji yang pernah disampaikan oleh pemerintah (agen) dalam kampanyenya (Nurritziana *et al.* 2017). Pemerintah daerah harus membuka akses kepada *stakeholder* secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkan, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet atau cara lainnya (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020). Semakin mudah akses terhadap laporan keuangan daerah maka semakin baik transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang tercipta. Sumbawati *et al.* (2018) menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Wiyana & Syah (2016), Nurritziana *et al.* (2017), Jatmiko *et al.* (2019), Natawibawa *et al.* (2019), Safutra *et al.* (2019), Hulu *et al.* (2020), dan Fuad & Winarsih (2021) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis kedua penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₂: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Stewardship theory menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan *stewardship theory* lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi (Donaldson & Davis, 1991). Menurut Robbins & Judge (2007:111) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Maka dari itu, komitmen ini sangat diperlukan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat secara luas demi menciptakan akuntabilitas kearah yang lebih baik. Semakin baik komitmen organisasi akan mendorong keberhasilan dalam akuntabilitas keuangan. Penelitian Mantako *et al.* (2019), Aprilya (2020), dan Savitri *et al.* (2020) menyatakan bahwa komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas, maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan sistem pengendalian intern agar dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan aturan yang ada dan untuk kepentingan publik yang tidak hanya disampaikan kepada DPRD saja tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat memperoleh informasi laporan keuangan tersebut (Arumanti, 2018). Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan sistem pengendalian intern yang tepat, karena dalam sistem pengendalian intern suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian Arumanti (2018) dan Mulyanto *et al.* (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis keempat penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄: Sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Teori keagenan dalam penelitian ini menjelaskan pertanggungjawaban pemerintah dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang mudah diakses bagi para pengguna laporan keuangan seperti akses melalui media dan *website* resmi pemerintah (Arumanti, 2018). Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui *website* resmi pemerintah dalam rangka memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu alat untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian intern yang efektif juga akan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Arumanti (2018) menyatakan bahwa internal *control*/sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₅: Sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aparatur yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik (Sarah *et al.* 2020). Pengadopsian teori *stewardship* dalam penelitian ini menjelaskan eksistensi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *steward* mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian internal untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga dengan adanya sistem pengendalian intern dapat membuat komitmen organisasi semakin tinggi dan pada akhirnya dapat mendorong keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian Adeyemi & Olarewaju (2019) dan Sarah *et al.* (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan, maka hipotesis keenam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₆: Sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan 20 LSM pemerintah daerah Kota Mataram. Sampel penelitian ini antara lain, sampel yang diambil berasal dari *stakeholders* internal adalah kepala OPD, kasubbag keuangan, dan auditor inspektorat pemerintah daerah Kota Mataram. Sampel yang diambil berasal dari *stakeholders* eksternal adalah 40 anggota DPRD dan masyarakat yang diwakili oleh LSM sebanyak 20 orang.

Variabel penyajian laporan keuangan diukur dengan indikator yang diadopsi dari PP Nomor 71 Tahun 2010, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Variabel aksesibilitas laporan keuangan diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian Sande (2013), keterbukaan, kemudahan, dan *acesibel*. Variabel komitmen organisasi diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian Mowday *et al.* (1979), identifikasi (*identification*), keterlibatan (*involvement*), dan loyalitas (*loyalty*). Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian Ramadhani (2011), pertanggungjawaban dana publik, jenis dan bentuk laporan keuangan hasil investigasi, penyajian tepat waktu, pemeriksaan (audit), dan respon yang cepat. Variabel sistem pengendalian intern diukur dengan indikator yang diadopsi dari penelitian Kurniatun (2013), lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu: sangat setuju diberi skor = 5; setuju diberi skor = 4; kurang setuju diberi skor = 3; tidak setuju diberi skor = 2; sangat tidak setuju diberi skor = 1. Analisis data menggunakan model *Moderated Regression Analysis* (MRA). Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_4 X_2 * Z + \beta_4 X_3 * Z + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- X₁ = Penyajian Laporan Keuangan
- X₂ = Aksesibilitas Laporan Keuangan
- X₃ = Komitmen Organisasi
- Z = Sistem Pengendalian Intern
- α = Konstanta
- β = Arah Koefisien Regresi
- ε = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner pada 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 40 anggota DPRD, dan 20 LSM pemerintah daerah Kota Mataram. Jumlah kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 146 kuesioner. Namun kuesioner yang kembali sebanyak 118 kuesioner. Sebanyak 28 kuesioner tidak kembali disebabkan karena responden ada yang bertugas ke luar kota. Selain itu, terdapat 4 kuesioner yang tidak dapat digunakan disebabkan beberapa pernyataan dalam kuesioner tidak dijawab oleh responden. Sehingga jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 114 kuesioner.

Tabel 1. Distribusi dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Kuesioner Disebar	Kuesioner Tidak Kembali	Kuesioner Kembali		
			Kuesioner Rusak	Kuesioner Digunakan	
Kepala OPD	32	2	4	26	81,25%
Kasubbag Keuangan	32	1	0	31	96,88%
Auditor Inspektorat	22	12	0	10	45,45%
Anggota DPRD	40	0	0	40	100%
LSM	20	13	0	7	35%
Total	146	28	4	114	78,08%

Sumber: Data Penelitian, 2021

Pengujian validitas untuk setiap pertanyaan pada kuesioner dapat dilihat dari nilai validitas pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilai *corrected item-total correlation* (r -hitung) dari setiap butir pertanyaan lebih besar dari r -tabel maka dinyatakan valid. Pada penelitian ini, untuk r -tabel dari df ($n-2$) pada $\alpha = 5\%$. Berdasarkan hasil uji validitas semua item pertanyaan pada setiap variabel adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai r -hitung masing-masing item yang lebih besar dari nilai r -tabel.

Pengujian reliabilitas suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$. Setiap variabel pada hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari $0,60$, maka dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang digunakan reliabel atau andal.

Uji normalitas dalam model regresi bertujuan untuk menguji adanya variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan uji statistik *one sample kolmogorov smirnov test* dengan menggunakan pendekatan *monte carlo (2-tailed)* untuk mendeteksi residual berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	Unstandardized Residuals
N	114
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,143

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan uji normalitas Tabel 2, menunjukkan nilai *monte carlo (2-tailed)* $> 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila semua variabel bebas dengan nilai $VIF < 10$ atau nilai *tolerance* $> 0,1$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X_1)	0,596	1,679	Bebas Multikolinieritas
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2)	0,774	1,292	Bebas Multikolinieritas
Komitmen Organisasi (X_3)	0,674	1,483	Bebas Multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern (Z)	0,691	1,448	Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data Penelitian, 2021

Hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan nilai *tolerance* tidak ada yang kurang dari 0,1 dan nilai VIF semua variabel independen di bawah 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya dan dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Jika tidak mengandung heteroskedastisitas, nilai signifikan variabel bebas terhadap nilai *absolute residual* lebih besar dari $\alpha = 0,05$ (Ghozali, 2016:31).

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan (X_1)	0,908	Bebas Heteroskedastisitas
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2)	0,963	Bebas Heteroskedastisitas
Komitmen Organisasi (X_3)	0,284	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern (Z)	0,333	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data Penelitian, 2021

Hasil uji heteroskedastisitas di atas menunjukkan nilai signifikansi semua variabel $> 0,05$, maka dapat disimpulkan semua variabel dalam model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi digunakan untuk mengetahui efek interaksi antara variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern (SPI) sebagai variabel moderasi.

Tabel 5. Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Variabel	Nilai			Keterangan
	Koefisien	t	Sig.	
Constant	-2,764	-0,176	0,861	
Penyajian Laporan Keuangan (X_1)	1,946	3,268	0,001	Diterima
Aksesibilitas Laporan Keuangan (X_2)	-1,324	-1,331	0,186	Ditolak
Komitmen Organisasi (X_3)	-1,354	-2,144	0,034	Ditolak
Sistem Pengendalian Intern (Z)	0,194	0,358	0,721	Ditolak
$X_1 * Z$	-0,051	-2,516	0,013	Diterima
$X_2 * Z$	0,045	1,318	0,190	Ditolak
$X_3 * Z$	0,048	2,238	0,027	Diterima
<i>Adjusted R Square</i> = 0,693				
Sig. F = 0,000				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013:96). Apabila uji F, *P value* atau nilai sig. menunjukkan $\alpha < 0,05$ maka model yang digunakan layak. Hasil uji F di atas diperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga model regresi layak untuk digunakan. Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,693 artinya variabel independen yaitu penyajian

laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), komitmen organisasi (X_3), sistem pengendalian intern (Z) serta interaksi 1 ($X_1 * Z$), interaksi 2 ($X_2 * Z$), dan interaksi 3 ($X_3 * Z$) mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 69,3% dan sisanya 30,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Hasil uji *moderated regression analysis* di atas menunjukkan, hipotesis pertama yang menyatakan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau (H_1) diterima. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi 1,946 dengan signifikansi sebesar $0,001 < 0,005$. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan Nurriszkiana *et al.* (2017), Jatmiko *et al.* (2019), Kurniawan & Rahayu (2019), Natawibawa *et al.* (2019), Safutra *et al.* (2019), dan Fuad & Winarsih (2021) yang menghasilkan penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Aprilia (2019) dan Hulu *et al.* (2020) menunjukkan penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berarti laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah Kota Mataram sudah baik serta memenuhi karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penyajian laporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya.

Hipotesis kedua yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau (H_2) ditolak. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki nilai koefisien regresi -1,324 dengan signifikansi sebesar $0,186 > 0,005$. Sehingga hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2018) dan Triyono *et al.* (2019) yang menyatakan aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil dari penelitian ini tidak mendukung penelitian Wiyana & Syah (2016), Nurriszkiana *et al.* (2017), Jatmiko *et al.* (2019), Natawibawa *et al.* (2019), Safutra *et al.* (2019), Hulu *et al.* (2020), dan Fuad & Winarsih (2021) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah Kota Mataram belum memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap keterbukaan laporan keuangan yang dipublikasikan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, radio, siaran televisi, internet khususnya *website* resmi milik pemerintah daerah (mataramkota.go.id). Ini juga disebabkan karena masyarakat tidak mudah mendapatkan akses atau informasi mengenai laporan keuangan pemerintah daerah Kota Mataram pada instansi terkait. Sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan pemerintah daerah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal.

Hipotesis ketiga yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau (H_3) ditolak. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel komitmen organisasi memiliki nilai koefisien regresi -1,354 dengan signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$. Sehingga hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mantako *et al.* (2019), Aprilya (2020), dan Savitri *et al.* (2020) menghasilkan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil ini menunjukkan bahwa aparatur pengelola keuangan pada pemerintah daerah Kota Mataram memiliki komitmen organisasi yang tinggi, memiliki integritas dan dorongan kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang menjadi kewenangannya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Namun, komitmen organisasi yang tinggi tidak menjamin dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini mendukung teori *stewardship* dimana aparatur pengelola keuangan harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin tinggi komitmen organisasi setiap individu akan mempengaruhi tingkat kecepatan dan ketepatan kerja yang dimilikinya.

Hipotesis keempat yang menyatakan sistem pengendalian intern (SPI) memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau (H_4) diterima. Hasil regresi menunjukkan variabel penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi ($X_1 * Z$) merupakan variabel *pure moderator* karena nilai koefisien b_2 tidak signifikan (0,721) pada persamaan 2 dan b_3 signifikan (0,013) pada persamaan 3. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arumanti (2018) dan Mulyanto *et al.* (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kota Mataram sudah menerapkan sistem pengendalian intern (SPI) yang tepat dalam menyajikan laporan keuangannya, karena dalam sistem pengendalian intern suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga berimplikasi pada akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik. Hasil ini mendukung teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan sistem pengendalian intern agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang ada.

Hipotesis kelima yang menyatakan sistem pengendalian intern (SPI) memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau (H_5) ditolak. Hasil regresi menunjukkan variabel aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,190 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi ($X_2 * Z$) merupakan variabel *homologiser moderator* karena nilai koefisien b_2 tidak signifikan ($0,721$) pada persamaan 2 dan b_3 tidak signifikan ($0,190$) pada persamaan 3. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Mulyanto *et al.* (2020) yang menyatakan sistem pengendalian internal tidak memoderasi aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang baik dan efektif pada pemerintah daerah Kota Mataram belum menjamin aksesibilitas laporan keuangan daerah akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini tidak mendukung teori keagenan yang menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diawasi dengan sistem pengendalian intern agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berupa penyajian laporan keuangan daerah yang tepat sesuai dengan aturan yang ada dan untuk kepentingan publik yang tidak hanya disampaikan kepada DPRD saja tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat memperoleh informasi laporan keuangan tersebut.

Hipotesis keenam yang menyatakan sistem pengendalian intern (SPI) memperkuat pengaruh komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah atau (H_6) diterima. Hasil regresi menunjukkan variabel komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern memiliki nilai signifikansi sebesar $0,027 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi ($X_3 * Z$) merupakan variabel *pure moderator* karena nilai koefisien b_2 tidak signifikan ($0,721$) pada persamaan 2 dan b_3 signifikan ($0,027$) pada persamaan 3. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adeyemi & Olarewaju (2019) dan Sarah *et al.* (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah desa. Hal ini berarti dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik dan efektif pada pemerintah daerah Kota Mataram akan membuat komitmen organisasi semakin tinggi sehingga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa eksistensi pemerintah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, maka pemerintah (*steward*) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian internal untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

SIMPULAN

Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan sistem pengendalian intern memperkuat pengaruh penyajian laporan keuangan dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah. Sistem pengendalian intern tidak memoderasi pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah Kota Mataram hendaknya memberikan perhatian langsung dalam meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan agar lebih terbuka kepada masyarakat dengan memperhatikan pemutakhiran data-data, sehingga *website* masing-masing OPD selalu menampilkan data terbaru. Selanjutnya, DPRD sebagai wakil rakyat memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pengawasan pelaksanaan, dan pelaporan, sehingga bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, DPRD pemerintah daerah Kota Mataram hendaknya mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan untuk penelitian mendatang, disarankan menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dalam analisis data dan menambahkan variabel lain yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti sistem akuntansi keuangan daerah, *value for money*, transparansi, dan desentralisasi fiskal. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner perlu dilengkapi dengan pertanyaan seperti wawancara langsung kepada responden sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih dalam begitupula dengan responden bisa memberikan penjelasan terhadap setiap jawaban yang dipilih.

REFERENSI

- Adeyemi, F. K., & Olarewaju, O. M. (2019). Internal Control System and Financial Accountability : An Investigation of Nigerian South-Western Public Sector. *Acta Universitatis Danubius. Oeconomica*, 15(1), 134-150.
- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(2), 109-122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Aprilya, K. R. (2020). Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1-20.
- Arumanti, N. R. (2018). Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Internal Control Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gowa) [Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <papers2://publication/uuid/512EBCE8-D635-4348-A67D-22DD52988F4C>
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Return. *Australian Journal of Management*, 16(1).
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building Theories From Case Study Research. *Academy of Management Review*, 14(4), 532-550.
- Fuad, K., & Winarsih. (2021). Direct and Indirect Testing for Accountability of Regional Financial Management and Trust Level of Public-Stakeholders in Local Government. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 13(1), 1-11.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does Competency, Commitment, and Internal Control Influence Accountability? *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.Vol7.No4.223>
- Hasibuan, N. H. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Studi Empiris Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Universitas Sumatera Utara.
- Hulu, S., Maksum, A., Kholis, A., Hulu, T. H. S., & Baene, C. (2020). Analysis of Determinants Accountability for Regional Financial Management in the Regional Government of North Nias Regency. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(9), 349–355. <https://doi.org/10.38124/ijisrt20sep261>
- Jatmiko, B., Prawoto, N., Puji Astuti, R., Nuhnita Sari, R., & Fil Ardhi, K. (2019). Application of Government Accounting Standards, Financial Statements Reporting, and Accessibility of Regional Finance Against Accountability for Regional Financial Management (Survey of All SKPDs of Kulon Progo Regency Government). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 102, 6–12. <https://doi.org/10.2991/icaf-19.2019.2>
- Kurniatun. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi terhadap Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Mataram). Magister Akuntansi Universitas Mataram.
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Mataram Tahun 2018). 6(1), 705–714.
- Mantako, S. A. A., Said, D., & Nurleni. (2019). The Influence of Organizational Commitment, Competence of Village Fund Management Officers, and Utilization of Information Technology on Accountability of Village Financial Management. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 04(02), 94–105.
- Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1979). Employee-organization Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism, and Turnover. *New York: Academic Press*.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), 176–185.
- Mulyanto, Budiman, N. A., & Fahmi, M. N. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kudus). *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 6(1), 16–26.

- <http://itbsemarang.ac.id/jbe/index.php/jbe33/article/view/91>
- Natawibawa, I. W. Y., Mulya, I. M. O., & Yoh, W. H. (2019). Transparency and Accountability As Determinants in the Financial Management of Universities: a Study on State Universities in Malang City. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 5(1), 57-72. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v5i1.247>
- Nirkomala. (2020). *Pandemi, APBD Perubahan 2020 Mataram Defisit Rp103,9 miliar*. <https://www.antaraneews.com/berita/1675838/pandemi-apbd-perubahan-2020-mataram-defisit-rp1039-miliar>
- Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1), 28-47. <https://doi.org/10.18196/jai.18159>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 (2020).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pub. L. No. Nomor 71, 1 (2010).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 184 (2019).
- Perdana, K. W. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Program Studi Akuntansi*.
- Puspita, R., & Martini, D. (2010). Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda. *Universitas Indonesia*.
- Ramadhani, R. (2011). Persepsi Stakeholder Internal Terhadap Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Universitas Sebelas Maret Pasca Ditetapkan Sebagai Badan Layanan Umum. Universitas Sebelas Maret.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2007). *Perilaku Organisasi*. Salemba Empat.
- Safutra, W., Darwanis, & Syam, F. (2019). The Effect of Regional Financial Statement Presentation and Regional Financial Statement Accessibility on Regional Financialmanagement Accountability in the District of Bener Meriah, Province of Aceh, Indonesia. *East African Scholars Journal of Economics, Business and Management*, 4464(12), 798-804. <https://doi.org/10.36349/easjebm.2019.v02i12.016>
- Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 2013 - *Ejournal.unp.ac.id*, 1-20.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat, dan SPI Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di

- Kabupaten Indragiri Hulu. 4(4), 330-342.
- Savitri, E., Andreas, A., Diyanto, V., & Gumanti, T. A. (2020). The Effect of Leadership, Internal Control System, and Organizational Commitment on Accountability of Village Financial Management. *Journal of Applied Management (JAM)*, 18(3), 522-532. <https://doi.org/10.21776/ub.jam.2020.018.03.12>
- Somad, A. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 4(2), 1-20.
- Sumbawati, S., Hamdani Husnan, L., & Busaini, B. (2018). Factors That Leads to Financial Management and Their Implications to Local Government Performance: What Should Be Done? *International Conference on Economic Education and Entrepreneurship (ICEEE)*, 718-723. <https://doi.org/10.5220/0006892207180723>
- Triyono, Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol 4, No 2 (2019)*, 118-135. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521>
- Wiyana, A., & Syah, S. (2016). Accessibility Determinant and the Presentation of Regional Financial Statement Towards the Accountability of Regional Financial Management. *Qualitative and Quantitative Research Review*, 1(3), 29-46.
- Yolanda, S. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating. *Jom Feb*, 1(1).